

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wisata Halal Lombok

1. Profil

a. Sejarah

Menurut isi Babad Lombok, kerajaan tertua yang pernah berkuasa di pulau ini bernama Kerajaan Laeq (dalam bahasa sasak laeq berarti waktu lampau), namun sumber lain yakni Babad Suwung, menyatakan bahwa kerajaan tertua yang ada di Lombok adalah Kerajaan Suwung yang dibangun dan dipimpin oleh Raja Betara Indera. Kerajaan Suwung kemudian surut dan digantikan oleh Kerajaan Lombok. Pada abad ke-9 hingga abad ke-11 berdiri Kerajaan Sasak yang kemudian dikalahkan oleh salah satu kerajaan yang berasal dari Bali pada masa itu. Beberapa kerajaan lain yang pernah berdiri di pulau Lombok antara lain Pejanggik, Langko, Bayan, Sokong Samarkaton dan Selaparang.

Kerajaan Selaparang sendiri muncul pada dua periode yakni pada abad ke-13 dan abad ke-16. Kerajaan Selaparang pertama adalah kerajaan Hindu dan kekuasaannya berakhir dengan kedatangan ekspedisi Kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Kerajaan Selaparang kedua adalah kerajaan Islam dan kekuasaannya berakhir pada tahun 1744 setelah ditaklukkan oleh gabungan

pasukan Kerajaan Karangasem dari Bali dan Arya Banjar Getas yang merupakan keluarga kerajaan yang berkhianat terhadap Selaparang karena permasalahan dengan raja Selaparang.[3] Pendudukan Bali ini memunculkan pengaruh kultur Bali yang kuat di sisi barat Lombok, seperti pada tarian serta peninggalan bangunan (misalnya Istana Cakranegara di Ampenan). Baru pada tahun 1894 Lombok terbebas dari pengaruh Karangasem akibat campur tangan Batavia (Hindia Belanda) yang masuk karena pemberontakan orang Sasak mengundang mereka datang. Namun, Lombok kemudian berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda secara langsung.

Masuknya Jepang (1942) membuat otomatis Lombok berada di bawah kendali pemerintah pendudukan Jepang wilayah timur. Seusai Perang Dunia II Lombok sempat berada di bawah Negara Indonesia Timur, sebelum kemudian pada tahun 1950 bergabung dengan Republik Indonesia.¹

Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan

¹ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok diakses pada Senin, 8 April 2019 pukul 21.20.

Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menjadi Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang- undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Dari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahanpun terus terjadi.

Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR. Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978 H.R. Wasita Kusuma digantikan H. Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal

sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs. H. Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si. pada tanggal 31 Agustus 1998.²

b. Visi dan Misi

Visi "Mewujudkan Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang". Sebagai refleksi dari pemaknaan atas ungkapan *baldatun tayyibatun wa rabbun gafūr* atau daerah yang aman, nyaman dan menyenangkan, dimana hidup dan kehidupannya dipenuhi hikmah dan keberkahan. Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat diwujudkan melalui 8 Misi pembangunan, sebagai berikut:

- 1) Percepatan perwujudan rehabilitas rekonstruksi pasca gempa, dengan konsep membangun yang transparan;
- 2) Percepatan perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan gender yang proporsional;
- 3) Percepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah tinggi;

² Diakses dari website resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat <https://www.ntbprov.go.id/pages/sejarah-provinsi-nusa-tenggara-barat> di akses pada 9 April 2019 pukul 13.40.

- 4) Percepatan peningkatan daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif;
- 5) Percepatan transformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan melayani;
- 6) Mempercepat pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan;
- 7) Mempercepat pengembangan infrastruktur penopang sektor pariwisata, industri sektor unggulan serta kawasan strategis, dan
- 8) Menegakkan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan.

c. Geografi

1) Luas dan batas wilayah administrasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (23,51%).

2) Iklim

Berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° – 32,1° C, dan

temperatur minimum berkisar antara 20,6° - 24,5°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan Nopember. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48 - 95 %.

3) Letak dan Kondisi Geografis

a) Nusa Tenggara Barat Terletak antara:

- Barat - Timur 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur;
- Utara - Selatan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan.

b) Batas Wilayah

- Sebelah Utara dengan: Laut Jawa dan Laut Flores;
- Sebelah Selatan dengan: Samudra Indonesia
- Sebelah Barat dengan: Selat Lombok / Provinsi Bali
- Sebelah Timur dengan: Selat Sape / Provinsi NTT

c) Luas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 4.1
Luas Daerah Menurut Kabupaten / Kota (Km²)

Kabupaten / Kota	Luas	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Lombok Barat	1.053,92	5,23
2. Lombok Utara	809,53	4,02
3. Lombok Tengah	1.208,40	6,00

4. Lombok Timur	1.605,55	7,97
5. Sumbawa Barat	1.849,02	9,17
6. Sumbawa	6.643,98	32,97
7. Dompu	2.324,60	11,53
8. Bima	4.389,40	21,78
9. Kota Mataram	61,30	0,30
10. Kota Bima	207,50	1,03
Jumlah / Total	20.153,20	100,00

(Sumber: Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Tabel 4.2
Tinggi Kota Dari Permukaan Laut

Kabupaten / Kota	Ibu Kota	Tinggi
1. Lombok Barat	Gerung	15
2. Lombok Utara	Tanjung	12
3. Lombok Tengah	Praya	107
4. Lombok Timur	Selong	166
5. Sumbawa Barat	Taliwang	11
6. Sumbawa	Sumbawa Besar	18
7. Dompu	Dompu	30
8. Bima	Raba	21
9. Kota Mataram	Mataram	27
7. Kota Bima	Raba	21

Sumber Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 4.3
Nama-Nama Gunung dan Tingginya Dirinci Per Pulau

Pulau	Nama Gunung	Tinggi
(1)	(2)	(3)
1. Pulau Lombok	Rinjani	3.775
	Mareje	716
	Timanuk	2.362
	Nangi	2.330
	Parigi	1.532
	Pelawangan	2.638
	Baru	2.376
2. Pulau Sumbawa	Batu Lanteh	1.730
	Tukan	1.400
	Jaran Pusang	1.283
	Soromandi/Donggo	1.467
	Tambora	2.851
	Sangiang	1.449
	Dodu	1.447
	Pajo	728
	Sambi	697

(Sumber: Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Tabel 4.4
Banyaknya Pulau yang Berpenghuni dan Tidak Berpenghuni Menurut Kabupaten / Kota

Kabupaten / Kota	Pulau Tidak Berpenghuni	Pulau Berpenghuni
(1)	(3)	(4)
1. Lombok Barat	26	35
2. Lombok Utara	-	3
3. Lombok Tengah	20	20
4. Lombok Timur	30	35
5. Sumbawa Barat	15	15
6. Sumbawa	57	62
7. Dompu	22	23
8. Bima	75	84
9. Kota Mataram	-	-
10. Kota Bima	-	-
Jumlah / Total	245	280

(Sumber: Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Tabel 4.5
Nama-Nama Bandar Udara/Pelabuhan Laut dan Lokasinya Dirinci Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten / Kota	Bandar Udara/Airport		Pel. Laut / Seaport	
	Nama	Lokasi	Nama	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lombok Barat	-	-	Lembar	Lembar
2. Lombok Utara	-	-	Pemenang	Kamp. Bangsal
3. Lombok Tengah	BIL	Praya	-	-
4. Lombok Timur	-	-	Kayangan	Lb. Lombok
5. Sumbawa Barat	Water Base PT. NNT	Benete	Poto Tano	Poto Tano
6. Sumbawa	Sultan Kaharudin	Sumbawa Besar	Badas Alas	Ds. Badas Alas
7. Dompu	-	-	Kempo Calabai	Kempo Calabai
8. Bima	M. Salahudin	Bima	Sape	Kamp. Bugis
9. Kota Mataram	-	-	Pelsus Pertamina	Ampenan
10. Kota Bima	-	-	Bima	Bima

(Sumber: Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

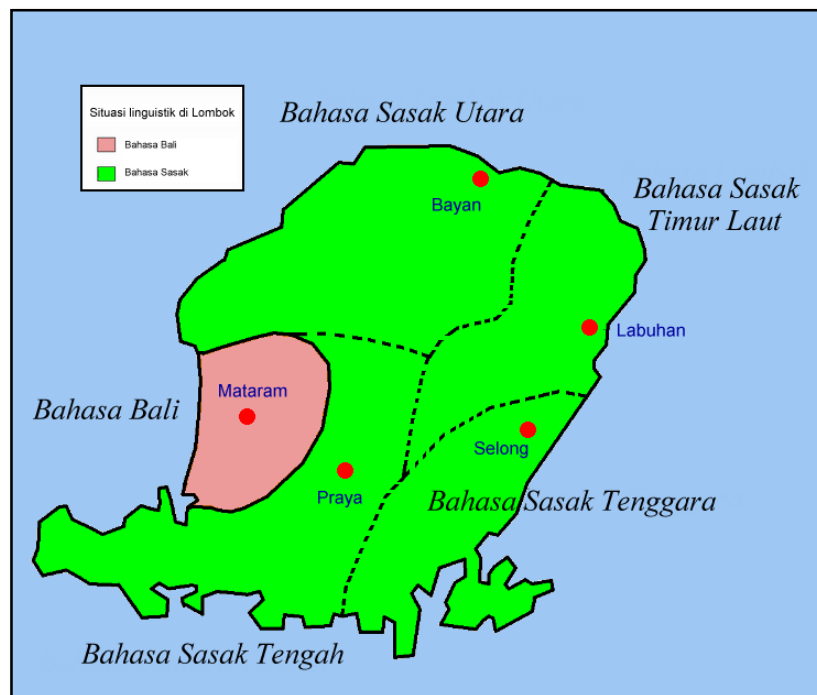
2. Demografi

Sekitar 80% penduduk pulau ini adalah suku Sasak, sebuah suku bangsa yang masih dekat dengan suku bangsa Bali, tetapi sebagian besar memeluk agama Islam. Sisa penduduk adalah orang Bali, Jawa, Tionghoa dan Arab.³

³ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok diakses pada Senin, 8 April 2019 pukul 21.20.

a. Bahasa

Disamping bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, penduduk pulau Lombok (terutama suku Sasak), menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa utama dalam percakapan sehari-hari. Di seluruh Lombok sendiri bahasa Sasak dapat dijumpai dalam empat macam dialek yang berbeda yakni dialek Lombok utara, tengah, timur laut dan tenggara. Selain itu dengan banyaknya penduduk suku Bali yang berdiam di Lombok (sebagian besar berasal dari eks Kerajaan Karangasem), di beberapa tempat terutama di Lombok Barat dan Kotamadya Mataram dapat dijumpai perkampungan yang menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa percakapan sehari-hari.



Gambar 4.1 Peta Bahasa di Pulau Lombok
(Sumber: <https://id.wikipedia.org/w/index.php?curid=157687>)

b. Agama

Sebagian besar penduduk pulau Lombok terutama suku Sasak menganut agama Islam. Agama kedua terbesar yang dianut di pulau ini adalah agama Hindu, yang dipeluk oleh para penduduk keturunan Bali yang berjumlah sekitar 15% dari seluruh populasi di sana. Penganut Kristen, Buddha dan agama lainnya juga dapat dijumpai, dan terutama dipeluk oleh para pendatang dari berbagai suku dan etnis yang bermukim di pulau ini. Organisasi keagamaan terbesar di Lombok adalah Nahdlatul Wathan (NW), organisasi ini juga banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam dengan berbagai level dari tingkat terendah hingga perguruan tinggi.

Di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di daerah Bayan, terutama di kalangan mereka yang berusia lanjut, dapat dijumpai para penganut aliran Islam Wetu Telu (waktu tiga). Tidak seperti umumnya penganut ajaran Islam yang melakukan salat lima kali dalam sehari, para penganut ajaran ini mempraktikkan salat wajib hanya pada tiga waktu saja.

Di Cakranegara (dulu bernama kerajaan Cakranegara) Kota Mataram sekarang, dulunya ditemukan Naskah Lontar Kuno oleh Ekspedisi Belanda (KNIL) kemudian diambil lalu dibawa ke Belanda, naskah lontar ini sebenarnya berada di Kerajaan Selaparang (sekarang sekitar daerah Pringgabaya, Lombok Timur), namun pada saat peperangan antara Bali dan Lombok, kerajaan Selaparang telah kalah karena diserang secara tiba-tiba, dan akhirnya semua harta benda milik kerajaan selaparang dirampas oleh pasukan Bali, sisa-sisa yang tidak terbawa kemudian dibakar. Termasuk

mahkota emas Raja selaparang (Pemban Selaparang) dan naskah lontar Negara Kertagama yang sedang dipelajari oleh para Putra dan Perwira kerajaan Selaparang.

3. Pariwisata

Lombok dalam banyak hal mirip dengan Bali, dan pada dasawarsa tahun 1990-an mulai dikenal wisatawan mancanegara. Namun dengan munculnya krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1997 dan krisis-krisis lain yang menyertainya, potensi pariwisata agak terlantarkan. Lalu pada awal tahun 2000 terjadi kerusuhan antar-etnis dan antar agama di seluruh Lombok sehingga terjadi pengungsian besar-besaran kaum minoritas. Mereka terutama mengungsi ke pulau Bali. Namun selang beberapa lama kemudian situasi sudah menjadi kondusif dan mereka sudah kembali. Pada tahun 2007 sektor pariwisata adalah satu-satunya sektor di Lombok yang berkembang.⁴. Berikut beberapa destinasi objek wisata:

- a. Wisata alam
 - 1) Pantai Senggigi
 - 2) Cakranegara
 - 3) Gili Air
 - 4) Gili Meno
 - 5) Gili Trawangan

⁴ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok diakses pada Senin, 8 April 2019 pukul 21.52.

- 6) Gunung Rinjani
- 7) Pantai Kuta, Lombok
- 8) Sembalun
- 9) Tetebatu
- 10) Air Terjun Sendang Gile
- 11) Gili Nanggu
- 12) Gili Sundak
- 13) Gili Tangkong
- 14) Hutan Monyet Pusuk
- 15) Sentanu
- 16) Pantai Pink (Kawasan Lombok Timur)
- 17) Air Terjun Dewi Selendang
- 18) Desa Bilok Petung

b. Wisata Budaya

- 1) Rambitan
- 2) Desa Sade
- 3) Sukarara
- 4) Masjid Bayan Beleq
- 5) Pura Suranadi
- 6) Pura Lingsar
- 7) Taman Narmada
- 8) Taman Mayura

9) Masjid Kuno Bilok Petung

10) Desa Banyumulek

Dalam perjalanannya, terdapat perkembangan-perkembangan yang kemudian oleh pemerintah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2013-2028, yang didalamnya terangkum mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari:⁵

1) Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Lombok, dan

2) Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Sumbawa.

Destinasi ini meliputi 11 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), yaitu empat KSPD di Pulau Lombok dan tujuh KSPD di Pulau Sumbawa. Berikut penjelasannya:

a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pulau Lombok

1) Kawasan Mataram Metro;

Ruang lingkup, terdiri dari:

a) Kota Mataram

b) Islamic Center

c) Loang Baloq

d) Taman Mayura

e) Sekarbela

⁵ Diakses dari website Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/kawasan-strategis/kawasan-strategis-pariwisata-daerah-kspd/> pada Rabu, 10 April pukul 04.36.

- f) Taman Narmada
- g) Suranadi
- h) Lingsar

Potensi yang dimiliki antara lain:

- a) Wisata Budaya
- b) Wisata Religi
- c) Wisata Kuliner
- d) Wisata Belanja
- e) Wisata MICE⁶

Wilayah administratif daerah ini mencakup:

- a) Kota Mataram, dan
- b) Sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat.

2) Kawasan Senggigi-Tiga Gili;

Ruang lingkup, terdiri dari:

- a) Batu Layar
- b) Batu Bolong
- c) Senggigi
- d) Tiga Gili

⁶ MICE, akronim bahasa Inggris dari "Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition" (Indonesia: Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran), dalam industri pariwisata atau pameran, adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar, biasanya direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan tertentu. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/MICE> pada Rabu, 10 April pukul 13.27.

- e) Sindang Gile
- f) Senaru
- g) Dusun Tradisional Segenter

Potensi yang dimiliki antara lain:

- a) Wisata Pantai
- b) Wisata Bawah Laut
- c) Wisata Olah Raga Berbasis Bahari
- d) Wisata Budaya
- e) Wisata Religi
- f) Wisata Kuliner

Wilayah administratif daerah ini mencakup:

- a) Sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan
- b) Sebagian wilayah Kabupaten Lombok Utara.

3) Kawasan Kuta-Mandalika, dan

Ruang lingkup, terdiri dari:

- a) Gili Gede
- b) Gili Nanggu
- c) Bangko-Bangko
- d) Selong Belanak
- e) Sade
- f) Kuta

g) Gili Indah

Potensi yang dimiliki antara lain:

- a) Wisata Pantai
- b) Wisata Bawah Laut
- c) Wisata Olah Raga Berbasis Bahari
- d) Wisata Budaya

Wilayah administratif daerah ini mencakup:

- a) Sebagian wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
- b) Sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan
- c) Sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur.

4) Kawasan Rasimas-Semalun.

Ruang lingkup, terdiri dari:

- a) Benang Stokel
- b) Gili Sulat
- c) Semalun
- d) Gunung Rinjani
- e) Otak Kokoq

Potensi yang dimiliki antara lain:

- a) Wisata Agro⁷

⁷ Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait (misal silo/lumbung dan kandang) yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

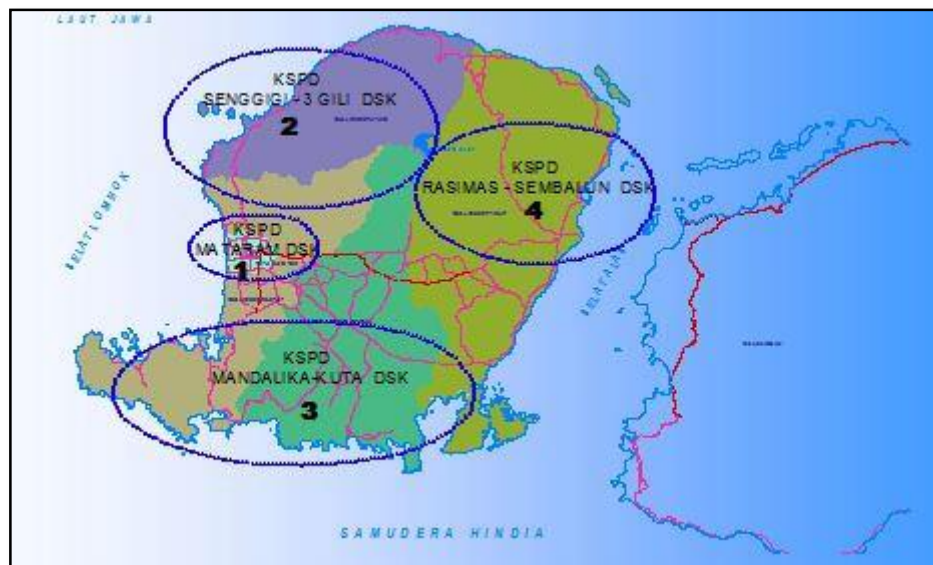
b) Wisata Pegunungan

c) Wisata Kuliner

Wilayah administratif daerah ini mencakup:

a) Sebagian wilayah Kabupaten Lombok Tengah, dan

b) Sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur.



Gambar 4.2 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pulau Lombok
(Sumber: Website Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
<http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/kawasan-strategis/kawasan-strategis-pariwisata-daerah-kspd/>)

b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pulau Sumbawa

1) Kawasan Alasutan;

Ruang lingkup, terdiri dari:

Agrowisata memiliki beragam variasi, seperti labirin jagung, wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, hingga restoran di atas laut. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Agrowisata> pada Rabu, 10 April 2019 pukul 11.10.

- a) Agrotamasa⁸
- b) Pulau Bedil
- c) Pulau Keramat
- d) Pulau Temudong
- e) Pulau Bungin

Potensi yang dimiliki antara lain:

- a) Wisata Agro⁹
- b) Wisata Budaya
- c) Wisata Kuliner

Wilayah administratif daerah ini mencakup:

- a) Kabupaten Sumbawa

2) Kawasan Pototano-Maluk;

Ruang lingkup, terdiri dari:

- a) Pototano
- b) Maluk

⁸ Wisata Agro Tamase adalah salah satu dari sekian banyak wisata alam yg berada di Pulau Sumbawa, selain Villa dan tempat yang sejuk, Agro Tamase Juga sekarang mulai diperbarui dan dipoles sedemikian indahnya untuk Spot Foto yg bernuansa alam. Dikutip dari <http://wisata-alam.kampung-media.com/2019/01/09/wisata-agro-tamase-mulai-mengepakkan-sayap-28158> pada Rabu, 10 April 2019 pukul 14.25.

⁹ Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait (misal silo/lumbung dan kandang) yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi, seperti labirin jagung, wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, hingga restoran di atas laut. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Agrowisata> pada Rabu, 10 April 2019 pukul 11.10.

Potensi yang dimiliki antara lain:

- a) Wisata Pantai
- b) Wisata Olah Raga Berbasis Bahari
- c) Wisata Budaya
- d) Wisata Kuliner

Wilayah administratif daerah ini mencakup:

- a) Kabupaten Sumbawa Barat

3) Kawasan Batu Hijau-Dodorinti;

Ruang lingkup, terdiri dari:

- a) Batu Hijau
- b) Dodorinti

Potensi yang dimiliki antara lain:

- a) Wisata Pegunungan
- b) Wisata Tambang
- c) Wisata Budaya
- d) Wisata Kuliner

Wilayah administratif daerah ini mencakup:

- a) Sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, dan
- b) Sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa.

4) Kawasan Samota (Teluk Saleh-Moyo-Tambora);

Ruang lingkup, terdiri dari:

- a) Aibari
- b) Moyo
- c) Batu Bulan
- d) Tambora
- e) Teluk Saleh

Potensi yang dimiliki antara lain:

- a) Wisata Pantai
- b) Wisata Bawah Laut
- c) Wisata Olah Raga Berbasis Bahari
- d) Wisata Budaya
- e) Wisata Kuliner
- f) Wisata Pegunungan

Wilayah administratif daerah ini mencakup:

- a) Sebagian wilayah Kabupaten Dompu
- b) Sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa
- c) Sebagian wilayah Kabupaten Bima

5) Kawasan Hu'u;

Ruang lingkup, terdiri dari:

a) Lakey Hu'u

Potensi yang dimiliki antara lain:

a) Wisata Pantai

b) Wisata Bawah Laut

c) Wisata Olah Raga Berbasis Bahari

d) Wisata Budaya

e) Wisata Kuliner

Wilayah administratif daerah ini mencakup:

a) Kabupaten Dompu

6) Kawasan Teluk Bima, dan

Ruang lingkup, terdiri dari:

a) Lawata

b) Amahami

c) Kota Bima

Potensi yang dimiliki antara lain:

a) Wisata Pantai

b) Wisata Olah Raga Berbasis Bahari

c) Wisata Budaya

d) Wisata Kuliner

Wilayah administratif daerah ini mencakup:

- a) Sebagian wilayah Kabupaten Bima, dan
- b) Sebagian wilayah Kota Bima.

7) Kawasan Waworada-Sape.

Ruang lingkup, terdiri dari:

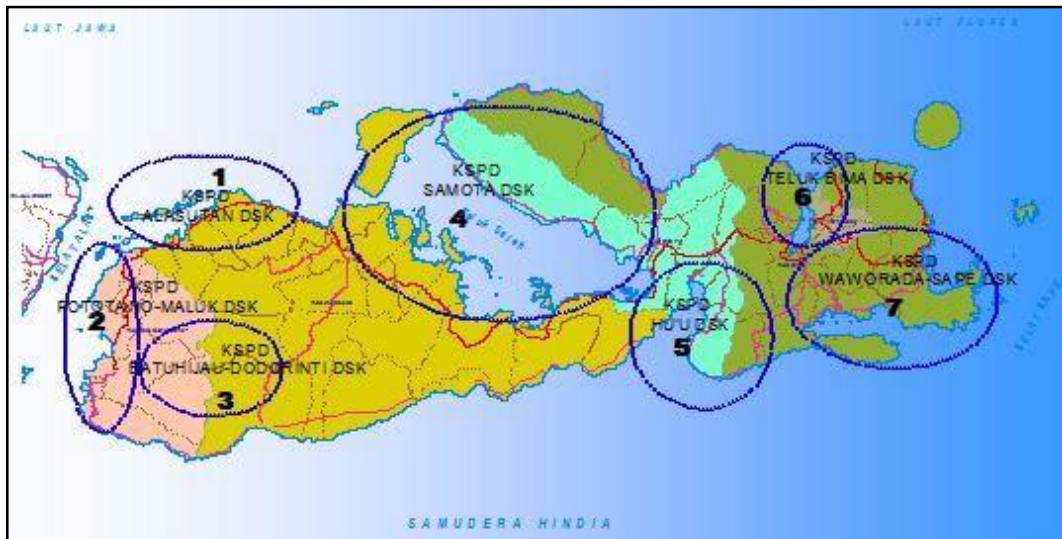
- a) Waworada
- b) Sape
- c) Wane

Potensi yang dimiliki antara lain:

- a) Wisata Pantai
- b) Wisata Bawah Laut
- c) Wisata Olah Raga Berbasis Bahari
- d) Wisata Kuliner

Wilayah administratif daerah ini mencakup:

- a) Kabupaten Bima



Gambar 4.3 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pulau Sumbawa
 (Sumber: Website Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
<http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/kawasan-strategis/kawasan-strategis-pariwisata-daerah-kspd/>)

Penjelasan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) di atas merupakan lampiran dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2028. Lebih lanjut, RIPPARDA ini merangkum secara detil mengenai pembangunan Kepariwisata daerah yang meliputi:

a) Destinasi Pariwisata;

Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik

wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan

b) Pemasaran Pariwisata;

Pemasaran pariwisata daerah adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

c) Industri Pariwisata, dan

Industri pariwisata daerah adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

d) Kelembagaan Pariwisata

Kelembagaan kepariwisataan daerah adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)

memuat:

- a) *Visi*, visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah “Terwujudnya Nusa Tenggara Barat sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Indonesiayang Berdaya Saing Internasional.”

b) *Misi*, misi pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pengembangan:

- (1) Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- (2) Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- (3) Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- (4) Organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

c) *Tujuan*, tujuan pembangunan kepariwisataan daerah adalah:

- (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- (3) Memajukan kebudayaan;
- (4) Meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan

(5) Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

d) *Sasaran*, sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah peningkatan:

(1) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;

(2) Jumlah pergerakan wisatawan nusantara;

(3) Jumlah inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata;

(4) Jumlah fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal;

(5) Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;

(6) Kualitas paket wisata yang variatif dan dikelola secara sinergis dan terintegrasi; dan

(7) Produk domestik bruto, pendapatan daerah, produk domestic regional bruto, dan pendapatan masyarakat di bidang kepariwisataan.

e) Arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2028.

Sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dijelaskan di atas tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028. Sasaran tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6
Sasaran Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sasaran	2012 (Data Dasar)	Pertumbuhan Per Tahun (2006-2012) (%)	Moderat				Optimis			
			2013	2018	2023	2028	2013	2018	2023	2028
Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	438.513	20,96	471.401	676.757	971.573	1.394.819	497.712	937.470	1.765.781	3.325.954
LOS Wisatawan Mancanegara (hari)	3,0 Hari	4,00	3,08	3,52	4,02	4,59	3,11	3,69	4,38	5,20
Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (US \$)	Rp. 900.000	4,00	927.900	1.080.922	1.259.180	1.466.834	1.287.000	1.158.639	1.765.189	1.765.189
Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)	568.229	15,76	623.915	995.720	1.589.092	2.536.067	657.440	1.363.086	2.826.118	5.859.453
LOS Wisatawan Nusantara (hari)	4,0 Hari	5,16	4,12	4,80	5,60	6,52	4,17	5,12	6,29	7,73
Pengeluaran Wisatawan Nusantara (rupiah)	Rp 500.000	10,06	520.000	632.659	769.727	936.490	528.000	693.351	910.485	1.195.618
PDRB (%) Perdagangan, Hotel, & Restoran	17,92 %	10,64	18,91	24,71	32,29	42,21	19,26	27,66	39,70	57,00

(Sumber: Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2013-2028)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Moderat:

Diasumsikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, didukung dengan pelaksanaan beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, baik untuk destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisata.

b. Pertumbuhan Optimistis:

Diasumsikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, didukung sepenuhnya oleh seluruh sektor dalam melaksanakan seluruharah kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, baik untuk Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisata.

4. Konsep Wisata Halal

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi di sektor kepariwisataan, juga melakukan pengembangan wisata halal yang kiranya untuk dapat menarik wisatawan mancanegara dari Timur Tengah dan Asia. Pengembangan ini dibuktikan pada *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15)* di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA) telah mengumumkan bahwa Indonesia, tepatnya Lombok, menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik, yaitu mendapat penghargaan *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination*.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menyikapi untuk pengembangan Pariwisata Halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan. Pertimbangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu aspek pembangunan dalam bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. Ini bertujuan sebagai

pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Dalam penerapannya, penyelenggaraan Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat berdasarkan asas-asas: a) transparansi, b) akuntabilitas, c) keadilan, d) partisipatif.¹⁰ Pembagunan pariwisata halal ini bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yang menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Pariwisata Halal. Ini terangkum pada ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:¹¹

a. Destinasi;

Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya yang dalam pengelolaannya harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti:

- 1) Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan
- 2) Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah.

b. Pemasaran dan promosi;

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal. Dalam Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI. dan HPI.¹²

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

¹¹ Pasal 5-27 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

¹² BPPD: Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah badan swasta (non-pemerintah) yang melakukan promosi destinasi pariwisata di daerah Nusa Tenggara Barat secara mandiri. DSN-MUI: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI

c. Industri;

Terdapat dua macam industri pariwisata yang diatur dalam peraturan daerah ini, yaitu: *industri pariwisata konvensional* adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syariah dan *industri pariwisata halal* adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI, pengelolaan industri pariwisata halal ini mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

d. Kelembagaan;

Kelembagaan ini terdiri dari kelembagaan Pemerintah Daerah meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas dan kelembagaan nonpemerintah yang meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

e. Pembinaan dan Pengawasan

yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah. ASITA: *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* Nusa Tenggara Barat adalah organisasi yang mewadahi usaha perjalanan wisata dan agen-agen perjalanan wisata di seluruh Indonesia dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi. FKD: Forum Kepariwisata Daerah adalah suatu forum keikutsertaan setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. PHRI: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat. HPI: Himpunan Pramuwisata Indonesia adalah wadah yang menghimpun pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat.

Pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal ini dilaksanakan oleh Dinas yang harus melibatkan DSN-MUI serta dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, dan HPI. Bentuk pembinaannya antara lain sosialisasi, stimulasi, bimbingan dan pelatihan.

Sedangkan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Pariwisata Halal dilaksanakan oleh Dinas yang dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, dan HPI. Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

f. Pembiayaan

Pembiayaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari dan dianggarkan pada:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- 2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Penerapan Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif bagi pengelola yang melanggar ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Pasal 11 ayat (2) mengenai kewajiban-kewajiban industri pariwisata konvensional dalam menyediakan: a) arah kiblat di kamar hotel; b) informasi masjid terdekat; c) tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim; d) keterangan tentang produk halal/tidak halal; e) tempat berwudhu

yang terpisah antara laki-laki dan perempuan; f) sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan g) tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

- b. Pasal 17 ayat (1) tentang pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi, dan
- c. Pasal 18 yang berkaitan dengan pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal yang diwajibkan untuk memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal, menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi pariwisata halal; dan menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI.

Pada tanggal 21 Juni 2016 Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan menyatakan pencabutan dan tidak berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 51).¹³

Lombok, Aceh, dan Jakarta adalah tiga wilayah teratas pada tahun 2018 dengan skor masing-masing 58, 57 dan 56. Nilai rata-rata pada tahun 2018 adalah 50. Dari 10 provinsi, hanya 6 mendapat skor di atas rata-rata sedangkan sisanya di

¹³ Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

bawah rata-rata. Riau & Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan berada di bawah 40% dalam skor penilaian untuk Pariwisata Halal.¹⁴

DESTINATION	Access	Communication	Environment	Services	IMTI 2018 SCORE	IMTI 2018 RANK
Lombok	63	59	80	41	58	1
Aceh	63	47	70	50	57	2
Jakarta	96	39	65	47	56	3
West Sumatera	57	51	73	45	55	4
Yogyakarta	89	50	42	49	51	5
West Java	79	39	42	54	51	6
Riau and Riau Islands	67	49	58	41	50	7
East Java (Malang Area)	75	38	54	42	48	8
Central Java	80	21	33	58	47	9
South Sulawesi (Makassar & Surroundings)	63	27	36	19	30	10
Average	73	42	55	45	50	
Highest	96	59	80	58	58	
Lowest	57	21	33	19	30	

Gambar 4.4 *Details of IMTI 2018 Scores*
(Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019))

Alat pengukuran yang digunakan dalam IMTI diadaptasi dari Model ACES GMTI¹⁵. Gambar berikut menguraikan rincian dari sub-kriteria pada setiap komponen.

Access	Communication	Environment	Services
Air Access	Muslim Visitor Guides	Domestic Tourist Arrivals	Halal Restaurants
Rail Access	Stakeholder Education	International Tourist Arrivals	Mosques
Sea Access	Market Outreach	Wi-Fi Coverage at Airports	Airports
Road Infrastructure	Tour Guides	Commitment to Halal Tourism	Hotels
	Digital Marketing		Attractions

Gambar 4.5 *The ACES Model*
(Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019))

¹⁴ *Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019)*, April 2019, 14.

¹⁵ ACES adalah singkatan dari *Access, Communication, Environment, Services*. Empat hal ini adalah model pengukuran *Global Muslim Travel Index (GMTI)*.

Model ACES mencakup empat area strategis (komponen): akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Empat komponen ini mewakili dan menunjukkan sub-komponen penting yang harus direpresentasikan demi meningkatkan Pariwisata Halal. Kemampuan untuk menyempurnakan masing-masing empat area strategis (komponen) sangat penting untuk perjalanan ramah-Muslim dan akan memiliki dampak berbeda pada tujuan bagi para Pelancong Muslim.

Komponen akses mempertimbangkan sub-kriteria berikut: akses transportasi dalam perjalanan udara, kereta api, laut dan infrastruktur jalan. Komponen ini mengukur kemudahan aksesibilitas destinasi wisata melalui beberapa moda transportasi. Destinasi wisata yang sulit diakses tidak akan dipertimbangkan oleh wisatawan Muslim.

Komponen komunikasi mempertimbangkan sub-kriteria berikut: panduan bagi wisatawan Muslim, profesionalisme pemangku kepentingan, pasar (market) yang terjangkau, kemampuan bahasa pemandu wisata dan kemampuan pemasaran digital. Komponen ini mengukur tingkat kesadaran dan tingkat terjangkau pasar (market) yang bersinggungan dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Ini juga mempertimbangkan kemudahan komunikasi antara para wisatawan dengan masyarakat sekitar. Destinasi yang memiliki komunikasi yang buruk akan sulit menjadi terkenal bagi wisatawan Muslim.

Komponen lingkungan mempertimbangkan sub-kriteria berikut: Kedatangan wisatawan domestic (nusantara), kedatangan turis internasional (mancanegara), ketersediaan cakupan Wi-Fi di bandara dan komitmen untuk menyelenggarakan

Wisata Halal. Komponen ini mengukur tingkah laku perjalanan Muslim dan mengukur tingkat keselamatan dan kenyamanan keseluruhan lingkungan. Lingkungan yang tidak bersahabat dan asing bagi pelancong Muslim umumnya akan membuat para wisatawan tidak ingin berkunjung.

Komponen layanan mempertimbangkan sub-kriteria berikut: restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan atraksi objek wisata. Komponen ini mengukur layanan kebutuhan berbasis agama disediakan oleh destinasi wisata. Layanan ini sangat penting untuk memungkinkan para pelancong Muslim dapat melakukan perjalanan yang bebas sambil tetapi tetap merasa yakin akan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan syariat.

Terkenal karena pantainya yang murni dan rumah bagi lebih dari satu seribu masjid, Lombok memenangkan "wisata halal terbaik dan tujuan bulan madu" di Abu Dhabi pada tahun 2015. Lombok diperingkatkan sebagai pemimpin dalam layanan ramah-Muslim dan fasilitas.

Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid adalah satu-satunya bandara yang beroperasi, melayani sebagian besar penerbangan domestik dari ibu kota Indonesia dan penerbangan internasional dari Singapura dan Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ini Lombok tidak memiliki sistem transportasi kereta api tetapi terdapat feri dari Bali ke Lombok dan pulau sekitarnya. Serta terdapat koneksi internet berbayar yang tersedia dengan jangkauan jaringan yang bagus.

Beberapa tempat umum seperti restoran menyediakan Wi-Fi gratis. Para wisatawan di Lombok terdiri terutama wisatawan internasional. Cukup banyak

restoran bersertifikat halal dan tersedianya tempat shalat (masjid/musholla). Saat ini Lombok memiliki 1 hotel yang sesuai Syariah dan 60 hotel dengan dapur bersertifikat halal. Bahasa Inggris banyak diucapkan oleh pemandu wisata dan beberapa pemandu wisata dapat berbicara Bahasa Arab.

Komitmen yang tinggi untuk terus lebih baik memposisikan Lombok sebagai tujuan wisata halal terbaik. Lombok bertujuan membuka kantor promosi pariwisata di Malaysia dan Singapura serta secara agresif memulai misi promosi pada skala internasional. Lombok juga berencana untuk membangun kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, Lombok berencana untuk memberlakukan lebih banyak penerbangan internasional langsung ke bandara yang terletak di Praya Lombok demi meningkatkan aksesibilitasnya. Oleh karena hal-hal diatas, Lombok menjadi destinasi wisata halal terbaik dan memperoleh peringkat pertama di *Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019)*, ini terangkum dalam *IMTI 2019 Reports*. Prestasi ini juga disampaikan langsung oleh *CEO & Founder CrescentRating and Halal Trip*, Fazal Bahardeen di Kementerian Pariwisata Indonesia Jakarta pada Senin (8/4/2019).¹⁶

¹⁶ Diakses dari media sosial Humas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) <https://www.instagram.com/p/BwDk0Q0nXrG/?igshid=1scsh7b862h1c> pada Selasa, 9 April 2019 pukul 05.45.

DESTINATION	Access	Communication	Environment	Services	IMTI 2019 SCORE	IMTI 2019 RANK
Lombok (West Nusa Tenggara)	63	116	80	50	70	1
Aceh	63	70	70	63	66	2
Riau & Riau Islands	67	60	57	68	63	3
Jakarta	96	43	65	53	59	4
West Sumatera	57	55	73	52	59	5
West Java	79	46	42	56	52	6
Yogyakarta	89	58	42	48	52	7
Central Java	79	28	33	60	49	8
East Java (Malang Area)	75	41	54	42	49	9
South Sulewasi (Makassar & Surroundings)	65	36	36	22	33	10
Average	73	55	55	51	55	
Highest	96	116	80	68	70	
Lowest	57	28	33	22	33	

Gambar 4.6 *Details of IMTI 2019 Scores*
(Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019))

DESTINATION	IMTI 2018 SCORE	IMTI 2018 RANK	IMTI 2019 SCORE	IMTI 2019 RANK	CHANGE
Lombok (West Nusa Tenggara)	58	1	70	1	+12
Aceh	57	2	66	2	+9
Riau & Riau Islands	50	7	63	3	+13
Jakarta	56	3	59	4	+3
West Sumatera	55	4	59	5	+4
West Java	51	6	52	6	+1
Yogyakarta	51	5	52	7	+1
Central Java	47	9	49	8	+2
East Java (Malang Area)	48	8	49	9	+1
South Sulawesi (Makassar & Surroundings)	30	10	33	10	+3

Gambar 4.7 *Ranking of the Provinces on IMTI 2019*
(Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019))

Lombok mempertahankan posisinya sebagai wilayah terbaik pertama di laporan IMTI 2019. Lombok telah membuktikan dirinya sebagai salah satu dari tujuan paling lengkap untuk pelancong Muslim di Indonesia dalam hal berbagai kriteria yang dianalisis. Dengan demikian Lombok dinobatkan sebagai wilayah

dengan peringkat pertama di Indonesia dengan skor tertinggi yaitu 70. Sedangkan Aceh mempertahankan posisinya di tempat kedua sementara Riau & Kepulauan Riau berhasil melampaui Jakarta dan muncul pada posisi ketiga.

Tabel 4.7
ACES Model Results Lombok West Nusa Tenggara

	Access (10%)	Communication (15%)	Environment (30%)	Services (45%)	Total
Lombok Nusa Tenggara Barat	62.50	115.6	79.5	50.	70.0

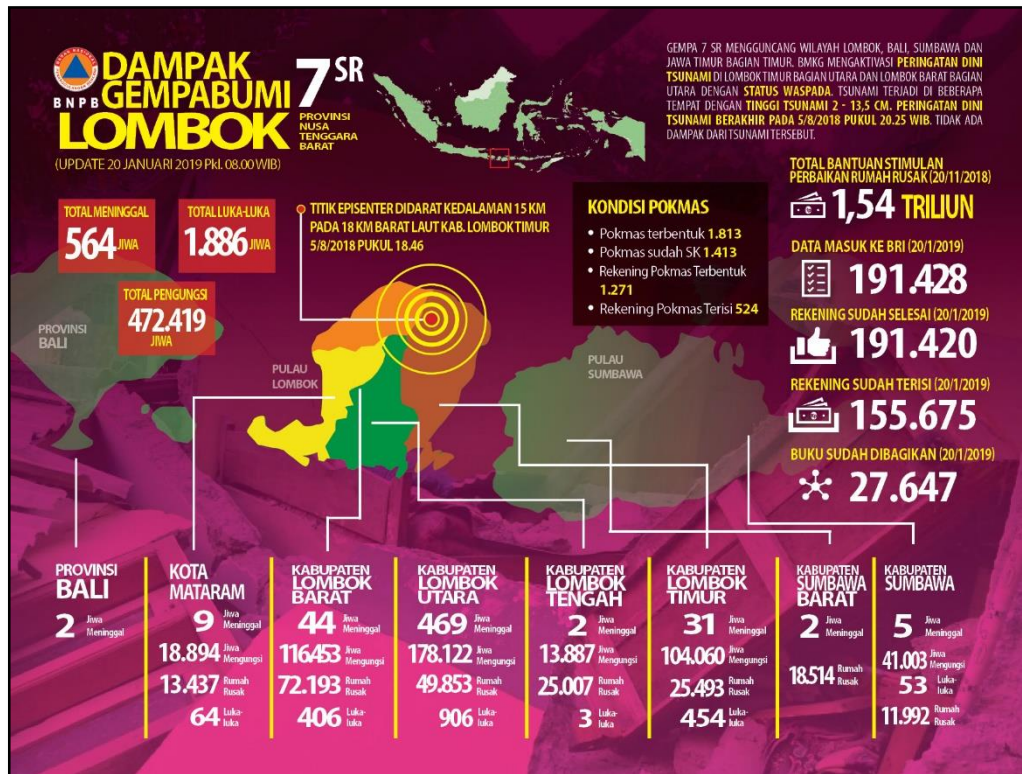
(Sumber: Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019))

B. Kondisi Umum Pariwisata di Lombok

1. Bencana Gempa Lombok 2018

Gempa Lombok 2018 merupakan fenomena yang langka dan menarik untuk dipahami perilakunya. Pola seismisitas yang naik turun memberikan kepanikan dan kebingungan, terutama masyarakat yang bermukim di Lombok, Bali dan Sumbawa. Setidaknya ada enam kejadian gempa bumi yang memiliki magnitudo lebih dari 5,5. Gempa bumi magnitudo 6,4 yang terjadi pada 29 Juli 2018 merupakan awal dari rangkaian Gempa Lombok 2018. Secara mekanisme kejadiannya, gempa ini dipicu oleh adanya aktivitas sesar naik di utara Lombok. Berdasarkan laporan awal BNPB pada 30 Juli 2018, gempa bumi ini mengakibatkan korban jiwa 16 orang dan lebih dari 10.000 bangunan rusak. Sedangkan BMKG mencatat, setidaknya ada 585 kejadian gempa susulan sampai dengan pukul 07.00, 5 Agustus 2018. Pukul 18.46 WIB, gempa bumi magnitudo 6,9 pada kedalaman hiposenter 34 km kembali menghantam Lombok bagian utara. Secara kekuatan, gempa kedua ini lebih besar dari gempa yang

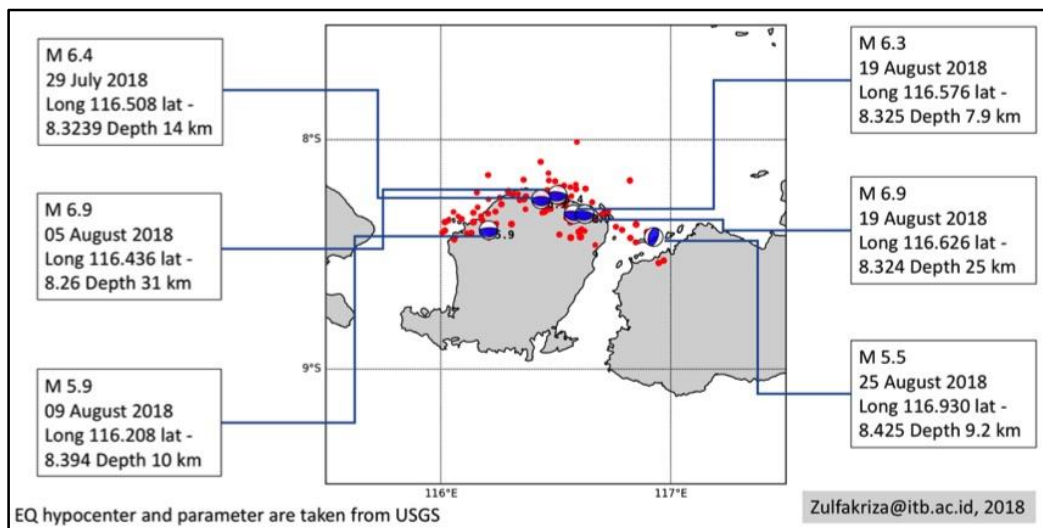
pertama. Tentunya kejadian ini memperbanyak jumlah korban jiwa dan memperparah kerusakan bangunan di Lombok, Bali, dan sebagian di Sumbawa bagian barat.



Gambar 4.8 Infografik Dampak Gempa Lombok 5 Agustus 2018 (Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

Berselang empat hari setelah gempa kedua, tepatnya pada 9 Agustus 2018 pukul 12.25 WIB, gempa dengan kekuatan 5,9 kembali terjadi. Posisi gempa ketiga lebih ke barat dan berbeda dengan gempa pertama dan kedua yang saling berdekatan di bagian utara Lombok.

Sekitar 10 hari setelah gempa ketiga tepatnya 19 Agustus 2018, kita kembali dikejutkan dengan dua gempa dengan kekuatan lebih besar dari magnitudo 6,0 terjadi di Lombok yang posisi gempanya lebih ke timur. Kedua gempa tersebut memiliki magnitudo 6,3 terjadi pada pukul 11.10 WIB dengan kedalaman hiposenter 7,9 km dan magnitudo 7,0 terjadi pada pukul 21.56 WIB dengan kedalaman hiposenter 25 km. Pada 25 Agustus 2018, gempa magnitudo 5,5 terjadi di timur Lombok atau lebih tepatnya di Sumbawa bagian barat. Gempa ini bisa dikatakan gempa ke-6 dari rangkaian Gempa Lombok yang magnitudonya lebih dari 5,5. Disamping gempa-gempa yang kekuatannya relatif lebih kecil, BMKG mencatat gempa-gempa susulan yang terjadi di Lombok baik yang dirasakan maupun tidak adalah lebih dari 2000 kejadian.



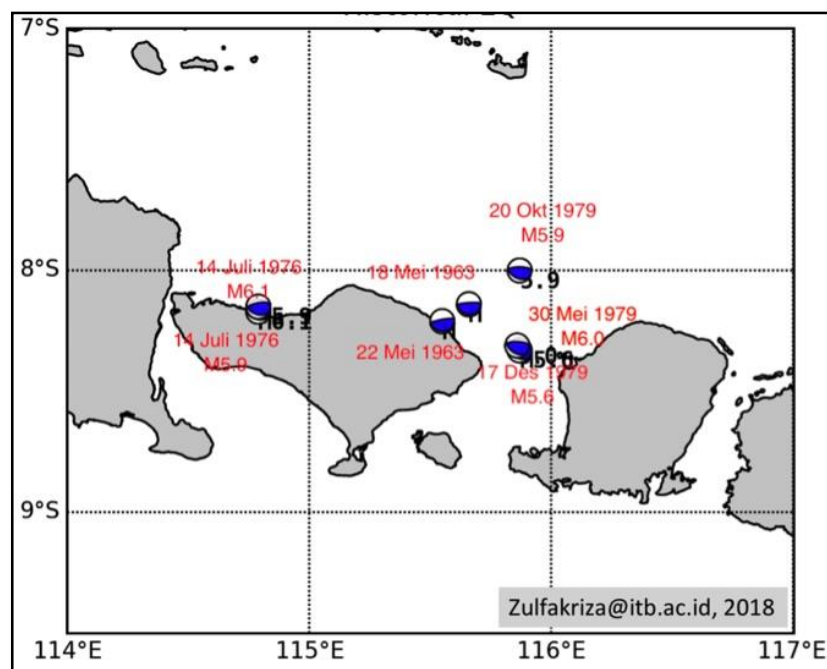
Gambar 4.9 Sebaran Gempa Lombok
(Sumber: Katalog USGS diolah oleh Zulfakriza)

Sebaran gempa yang terjadi di Lombok, enam gempa besar ditandai dengan lingkaran hitam kombinasi biru yang memberi informasi mekanisme fokus sesar

naik. Sedangkan lingkaran merah adalah sebaran gempa susulan yang terjadi mulai tanggal 29 Juli – 10 September 2018. Data mekanisme fokus dan hiposenter gempa diperoleh dari katalog USGS dan diolah oleh Zulfakriza. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), secara keseluruhan kerusakan yang diakibatkan oleh rangkaian Gempa Lombok 2018 adalah 71.962-unit rumah rusak, 671 fasilitas pendidikan rusak, 52-unit fasilitas kesehatan, 128-unit fasilitas peribadatan dan sarana infrastruktur. Baca juga: 6 Dampak Gempa Lombok, Tertimpa Bangunan hingga Pos PVMBG Retak Sedangkan data korban adalah 460 orang meninggal dunia, 7.733 korban luka-luka, 417.529 orang mengungsi. Perkiraan kerugian sementara yang dilakukan oleh BNPB akibat Gempa Lombok mencapai triliunan. Angka ini belum termasuk kerugian yang diakibatkan oleh penurunan kunjungan wisatawan lokal dan manca negara.

Dari sejarah tektonik dan sejarah kegempaan di Lombok, kawasan Bali dan Nusa Tenggara memiliki tatanan tektonik yang rumit dan aktif. Keberadaan zona subduksi di bagian selatan yang merupakan zona tumbukan antara Lempeng Kerak Samudra Indo-Australia dengan Lempeng Benua Eurasia. Salah satu implikasi dari adanya aktivitas tumbukan pada zona ini adalah terjadinya gempa bumi. Sedangkan di bagian utara Bali dan Nusa Tenggara, kondisi tektoniknya dipengaruhi oleh adanya aktivitas pada busur belakang Flores yang terbagi dalam dua segmen. Berdasarkan buku Peta Bahaya Gempa Indonesia 2017, kedua segmen tersebut adalah Segmen Bali dan Segmen Lombok Sumbawa. Selain dua segmen tersebut, sisi timur dan barat Lombok diimpit oleh beberapa

segmen struktur tektonik. Di barat Lombok terdapat dua segmen, yaitu Lombok North dan Lombok Central. Sedangkan di bagian timur Lombok terdapat tiga segmen, yaitu Sumbawa North, Sumbawa Central dan Sumbawa South.¹⁷ Berdasarkan makalah McCaffrey & Nabelek memaparkan tentang dinamika tektonik dan sejarah kegempaan di Bali dan Nusa Tenggara, dia menjelaskan setidaknya ada tujuh kejadian gempa sejak 1963 di Bali dan Lombok dengan magnitudo yang relatif besar. Ketujuh gempa itu adalah gempa pada 18 Mei 1963, 22 Mei 1963, 2 gempa pada 14 Juli 1976, 30 Mei 1979, 20 Oktober 1979, dan 17 Desember 1979.



Gambar 4.10 Sejarah Sebaran Gempa Bali-Lombok
(Sumber: Katalog USGS diolah oleh Zulfakriza)

¹⁷ McCaffrey & Nabelek, *Earthquake, Gravity, and The Origin of The Bali Basin: An Example of a Nascent Continental Fold-and-Thrust Belt*. Journal of Geophysical Research (1987).

Gambar 4.10 menjelaskan sebaran gempa bumi pada tahun 1963, 1976 dan 1979 yang terjadi di Bali dan Lombok. Terlihat bahwa secara posisi, gempa-gempa terjadi berada di bagian barat Lombok dan utara Bali. Sedangkan untuk Lombok bagian utara cenderung tidak gempa dengan magnitudo yang signifikan. Secara pola mekanisme kejadian gempa, gempa yang terjadi pada 2018 hampir sama dengan gempa yang terjadi pada 1963, 1976, dan 1979. Mekanismenya adalah sesar naik. Hal ini memberi pemahaman bahwa gempa-gempa tersebut dipicu oleh aktivitas sesar naik yang ada di utara Bali dan Lombok. Gempa Lombok 2018 posisinya berbeda dengan gempa 1963, 1976 dan 1979. Dan tidak tertutup kemungkinan kejadian gempa pada 1963, 1976, dan 1979 akan berulang kembali. Tentu kita tidak berharap kejadian gempa tahun 1963, 1976 dan 1979 kembali berulang. Akan tetapi kita perlu memahami bahwa gempa memiliki pola yang berulang.¹⁸

2. Hasil Penelitian Wisata Lombok

Sejak bencana gempa Lombok hampir setahun silam, kondisi industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih memprihatinkan. Tingkat hunian kamar hotel (okupansi) selama bulan Februari 2019 hanya 32,63 persen, makin turun dibanding kondisi Januari 2019 yang mencapai 32,84 persen. Penurunan

¹⁸ Zulfakriza Z, *Melihat Kembali Gempa Lombok 2018 dan Sejarah Kegempaannya*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/09/23/11321551/melihat-kembali-gempa-lombok-2018-dan-sejarah-kegempaannya?page=all>. pada Rabu, 10 April 2019 pukul 16.24.

okupansi hotel tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono, Senin 1 April 2019. "Pariwisata NTB belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan tahun ini," kata dia. Menurut Suntono, jika dibandingkan dengan okupansi hotel bintang pada bulan Februari 2018 yang sebesar 40,60 persen, artinya ada penurunan sebesar 7,97 persen. Adapun okupansi Hotel Non Bintang bulan Februari 2019 juga lebih rendah lagi, hanya sebesar 20,60 persen atau turun 3,77 persen dibanding bulan Januari 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa rata-rata lama menginap (*length of stay*) tamu hotel bintang di NTB pada bulan Februari 2019 tercatat 2,16 hari. Ini turun sebesar 0,75 hari dibandingkan dengan lama menginap bulan Januari 2019 yang sebesar 3,16 hari. Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Februari 2019 tercatat 44.654 orang. Ini terdiri dari 34.822 orang tamu domestik (77,98 persen) dan 9.832 orang tamu dari luar negeri (22,02 persen). Jumlah wisatawan asing yang datang melalui penerbangan langsung di Lombok Internasional Airport bulan Februari 2019 sebanyak 3.588 orang. Wisatawan terbanyak adalah dari Malaysia yakni 1.517 orang, dan dari Cina 670 orang. Apabila ditelusuri lebih lanjut, secara kumulatif, hingga bulan Februari 2019 kunjungan wisatawan ke Indonesia mengalami penurunan, ini sebagaimana data infografik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laman *website*-nya.



Gambar 4.11 Perkembangan Pariwisata Februari 2019
(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Muhammad Lalu Faozal¹⁹ mengungkapkan:

Industri perhotelan di Nusa Tenggara Barat terpuak akibat gempa sehingga dibutuhkan minimal tiga bulan untuk kembali normal seperti sedia kala. Hampir 20% bangunan hotel di Lombok Utara dilaporkan rusak parah, tetapi sebagian besar hotel lainnya dilaporkan "hanya retak-retak". Terutama hotel yang ada di pesisir utara pulau Lombok, termasuk hotel di tiga gili (pulau) yang menggunakan konstruksi beton," kata Kepala Dinas Pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Lalu Faozal kepada BBC News Indonesia, Rabu (08/08).

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Lalu Abdul Hadi Faisal kepada BBC News Indonesia mengatakan jumlah wisatawan yang

¹⁹ Wawancara Kepala Dinas Pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat kepada BBC News Indonesia, tanggal 8 Agustus 2018.

meninggalkan Lombok pasca gempa hampir 70%, sisanya 30% masih berada di sekitar Lombok. Dia mengklaim sebagian besar turis yang meninggalkan Lombok merupakan wisatawan yang tinggal di kawasan Lombok Utara saat gempa mengguncang. Sekitar Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan dan kemudian di sekitar Senggigi, memilih keluar dari Lombok. Tapi wisatawan di Lombok Tengah dan Mataram masih banyak menetap.²⁰

“Menurut Sultan Akhyar, pariwisata di Lombok secara umum telah beranjak pulih. Mengenai wisata halal, itu terletak di beberapa tempat, tidak semua destinasi mengadopsinya. Tetapi untuk dalam hal akomodasi, hampir seluruh akomodasi di Lombok khususnya Mataram sudah memiliki sertifikat halal.”²¹

Lebih lanjut lagi, dalam perjalanan peneliti di Lombok Nusa Tenggara Barat. Peneliti bertemu dengan salah satu masyarakat yang bekerja sebagai *driver* transportasi online sekaligus bekerja di industri perhotelan tepatnya di Hotel Mataram beralamat di Jl. Pejanggik No.105, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83231.

“Menurut Mustwahid, Lombok hampir lebih bergantung pada pariwisata. Sejak terjadinya gempa proses pemulihan masih berjalan hingga sekarang, walaupun tidak terlepas dari beberapa kendala, seperti bantuan pemerintah yang memiliki birokrasi yang lamban. Konsep wisata halal yang digadagadag oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah atas inisiasi Gubernur terdahulu yaitu (TGB) H. Muhammad Zainul Majdi. Wisata halal ini diproyeksikan diterapkan diseluruh destinasi wisata Lombok-Sumbawa, tapi saat ini masih di beberapa destinasi saja. Terlepas dari itu, walaupun

²⁰ Wawancara Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB kepada BBC News Indonesia, tanggal 8 Agustus 2018.

²¹ Wawancara dengan Sultan Akhyar di Praya, tanggal 31 Maret 2019.

belum semua destinasi menerapkan wisata halal, tempat penginapan maupun kuliner yang tersedia, rata-rata telah memiliki Sertifikat Halal dari MUI NTB.”²²

Pada kesempatan lain, peneliti berdiskusi dengan pelaku usaha travel di Lombok, yang kesehariannya melakukan perjalanan lintas destinasi wisata di Pulau Lombok.

“Menurut Suhaeli, wisata di Lombok lumpuh total saat terjadinya gempa. Wisata disini sangat terkenal oleh wisatawan mancanegara, ini dikarenakan daerah Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air merupakan destinasi lanjutan yang dituju oleh wisatawan mancanegara setelah Bali. Karena Kawasan 3 Gili ini memiliki lingkup wisata bawah laut yang bagus. Para wisatawan mancanegara lebih banyak mengambil perjalanan laut menggunakan feri menuju Pelabuhan Bangsal.”²³

Ketika peneliti bertanya mengenai wisata halal, Suhaeli menerangkan bahwa dirinya baru mendengar istilah tersebut dan tidak mengetahui detil mengenai wisata halal, hanya berasumsi ada kemungkinan itu hanya ada di kota (Mataram). Masih di tempat yang sama, peneliti berbincang dengan masyarakat sekitar Pelabuhan Bangsal.

“Menurut Erwin, wisata disini (Gili Trawangan) lebih cocok untuk anak-anak muda yang mencari hiburan, belum ada pembicaraan dari masyarakat sini maupun dari pemerintah tentang wisata halal. Disana (Gili Trawangan) banyak hiburan-hiburan malam, karena banyak *club* (café) dilengkapi dengan

²² Wawancara dengan Mustawahid di Mataram Lombok, tanggal 1 April 2019.

²³ Wawancara dengan Suhaeli di Pelabuhan Bansasal, Lombok, tanggal 3 April 2019.

minuman-minuman berakohol serta musikc-musik keras (EDM)²⁴. Tetapi disana tidak tersedia griya pijat *plus-plus*, itu adanya disekitar Senggigi.”²⁵

Hasil perbincangan tersebut peneliti memastikan dengan mengunjungi daerah Senggigi dan menemukan *club* malam (*café-café*) berjejer rapi hampir sepanjang jalan utama daerah Senggigi serta terdapat Spa, Sauna dan Griya Pijat. Indikasi adanya kegiatan *seks* bebas di Spa, Sauna dan Griya Pijat, peneliti menelusurinya melalui situs daring KASKUS²⁶ dengan kata kunci ‘khusus’ dan menemukan bahwa hampir di seluruh daerah Senggigi memiliki wisata *plus-plus* dilanjut di beberapa daerah lainnya serta Senggigi terkenal sebagai daerah dengan ‘hiburan malam’.

Selanjutnya peneliti melakukan tanya jawab via aplikasi daring dengan seorang narasumber yang bersedia berdiskusi dengan permintaan tidak ingin namanya dicantumkan pada hasil penelitian ini.

“Menurut RS, di Lombok Timur wisatanya ada pantai dan gunung, tapi kalau yang mau bebas di Gili Trawangan, sangat bertolak belakang dengan wisata halal. Pemerintah disini tentu juga berfikir apabila ingin menutup, karena pendapatan tersebarnya dari wisatawan (bule). Disana (Gili Trawangan) ada minuman-minuman keras, seks bebas dan narkoba. Walaupun tentang narkoba masih simpang siur, adanya khamr dan seks bebas itu sudah menjadi perpaduan yang jauh dari wisata halal”²⁷

²⁴ Musik dansa elektronik atau *electronic dance music* adalah berbagai genre musik elektronik perkusif yang dibuat sebagian besar untuk klub malam, rave, dan festival-festival.

²⁵ Wawancara dengan Erwin di Pelabuhan Bangsal, tanggal 2 April 2019.

²⁶ Kaskus adalah situs forum komunitas maya Indonesia dan penggunaanya disebut dengan Kaskuser. Kaskus dikelola oleh PT Darta Media Indonesia, Kaskus memiliki lebih dari 6 juta pengguna terdaftar. Pengguna Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia.

²⁷ Wawancara dengan RS (inisial) di Lombok, tanggal 1 April 2019.

Peneliti menindaklanjuti lebih lanjut mengenai adanya ketiga hal di atas (minuman keras, seks bebas dan narkoba) di Gili Trawangan dengan mengunjungi langsung destinasi tersebut. Peneliti menemukan adanya minuman-minuman keras, karena terlihat/terpampang secara jelas di talase-etalase toko maupun café-café yang terdapat disepanjang garis pantai. Mengenai seks bebas, hanya asumsi yang dapat ditarik oleh peneliti yang mengarah pada adanya kegiatan tersebut (seks bebas), karena rata-rata wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan adalah wisatawan mancanegara, baik secara berkelompok maupun berpasangan dan berpakaian mini (*bikini*) selama berkegiatan baik di pagi hari maupun malam hari. Untuk indikasi adanya narkoba, peneliti tidak dapat mengambil resiko lebih jauh karena akan sedikit melebar dari topik bahasan. Tetapi peneliti menemukan berita yang mengacu pada hal tersebut. Dilansir dari Tempo versi Bahasa Inggris, bahwa ditemukan 1.21 kg ganja dengan tersangka berkebangsaan Amerika berinisial CS (46), atas dugaan keterlibatan dalam perdagangan narkoba di pulau wisata Gili Trawangan.²⁸

Wisatawan yang berkunjung ke destinasi-destinasi di Pulau Lombok, lebih dominan disebabkan karena pesona keindahan alam, pesona pantai serta pesona bawah laut yang ditawarkan daripada karena adanya wisata halal itu sendiri. Ini ditunjukkan dari hasil beberapa perbincangan peneliti dengan beberapa wisatawan. Ari dan keluarganya berkunjung ke Lombok, khususnya ke Gili Trawangan disebabkan oleh pesona keindahan alam bawah laut yang ditawarkan. Dia mengaku

²⁸ Diakses dari <https://en.tempo.co/read/1191051/police-nab-american-national-for-alleged-drug-trafficking> pada Senin, 1 April 2019.

baru mendengar istilah wisata halal ketika peneliti menanyakan hal tersebut.²⁹ Jawaban yang hampir sama diungkapkan oleh beberapa wisatawan lain yang ditemui di lokasi wisata Pantai Senggigi, salah satunya Iwan Syarif.³⁰ Lain halnya dengan Ruth dan Kathleen, kedua wisatawan mancanegara ini, mengetahui tentang wisata halal ini setelah berada di Lombok, tepatnya ketika berjalan melintasi Islamic Center di Kota Mataram dan tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi. Mereka berdua dipandu oleh seorang petugas yang menjaga di Menara masjid untuk berkeliling masjid dengan menggunakan sebuah jubah merah dikarenakan pakaian mereka berdua ‘terbuka’.³¹

²⁹ Wawancara dengan Ari di Gili Trawangan Lombok, tanggal 2 April 2019.

³⁰ Wawancara dengan Iwan di Pantai Senggigi, tanggal 1 April 2019.

³¹ Wawancara dengan Ruth dan Kathleen di Islamic Center Mataram, tanggal 1 April 2019.

